



DISHUB
Kota Bandung

LKIP

TA. 2025



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

**DINAS PERHUBUNGAN
KOTA BANDUNG**



KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan ke hadirat ALLAH SWT karena berkat rahmat dan karunia — Nya dalam membimbing dan memberikan kekuatan sehingga dokumen Laporan Kinerja Instransi Pemerintah (LKIP) Dinas Perhubungan Tahun 2025 ini dapat disusun dan diselesaikan sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

Laporan Kinerja Instransi Pemerintah (LKIP) ini disusun sebagai pelaksanaan dari Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKIP Dinas Perhubungan Kota Bandung Tahun 2025 ini dapat menggambarkan kinerja Dinas Perhubungan Kota Bandung dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan. Pada Kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang berkontribusi dalam penyelesaian laporan ini. Semoga apa yang dirumuskan dalam LKIP Dinas Perhubungan Kota Bandung Tahun 2025 diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Dinas Perhubungan Kota Bandung kepada pihak-pihak terkait.

Kota Bandung, Januari 2026

Kepala Dinas Perhubungan

Kota Bandung



RASDIAN SETIADI, S.IP., MM.

NIP. 196909202014101001



Daftar Isi

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	I-1
A. Latar Belakang.....	I-1
B. Gambaran Umum Dinas Perhubungan	I-2
C. Tugas dan Fungsi	I-3
D. Isu Strategis.....	I-4
E. Landasan Hukum	I-5
F. Sistematika.....	I-6
BAB II PERENCANAAN KINERJA	II-1
2.1 Perencanaan Strategis Sebelum Reviu	II-1
A. Rencana Strategis.....	II-1
B. Indikator Kinerja Utama.....	II-4
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2025.....	II-5
2.2 Perencanaan Strategis Hasil Reviu.....	II-6
A. Rencana Strategis Hasil Reviu.....	II-7
B. Indikator Kinerja Utama Hasil Reviu.....	II-8
C. Perjanjian Kinerja Hasil Reviu.....	II-11
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	III-1
A. Kerangka Pengukuran Kinerja	III-1
B. Capaian Indikator Kinerja Utama	III-3
C. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis	III-5
BAB IV PENUTUP	IV-1
A. Kesimpulan	IV-1
B. Rekomendasi.....	IV-3
C. Tindak Lanjut LKPJ.....	IV-3
D. Saran	IV-4



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Dinas Perhubungan selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Dinas sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kota Bandung, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Kota, Propinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).



Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut Dinas Perhubungan Kota Bandung diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Penyusunan LKIP Dinas Perhubungan Kota Bandung Tahun 2025 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

B. Gambaran Umum Dinas Perhubungan

Berdasarkan Perda Kota Bandung Nomor 21 Tahun 1997, Dinas Perhubungan Kota Bandung dibentuk berdasarkan Perda Kota Bandung Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung. Sebelum berubah menjadi Dinas Perhubungan, Nomenklatur Dinas Perhubungan adalah sebagai berikut:

- Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Propinsi DT. I Jawa Barat Cabang Kotamadya DT. II Bandung sampai dengan tahun 1997;
- Dari tahun 1997 sampai dengan tahun 2001 dirubah menjadi Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kotamadya DT.II Bandung;
- Dan sejak tahun 2001 sampai dengan sekarang menjadi Dinas Perhubungan Kota Bandung.

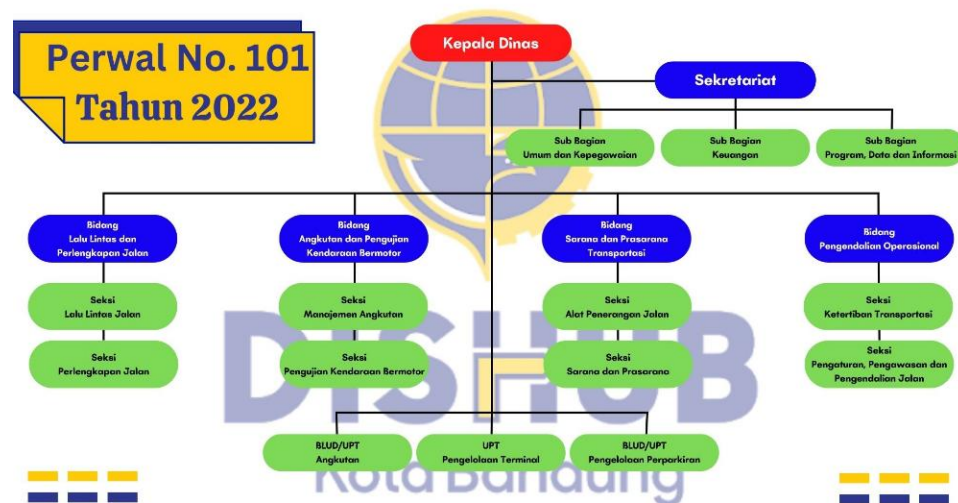
C. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan Daerah di bidang Perhubungan berdasarkan asas otonomi dan pembantuan.

Dalam menyelenggarakan tugas dan kewajiban tersebut Dinas Perhubungan mempunyai fungsi :

- Perumusan kebijakan lingkup Perhubungan;
- Pelaksanaan kebijakan lingkup Perhubungan;
- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan lingkup Perhubungan;
- Pelaksanaan administrasi lingkup Dinas; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban Dinas dipimpin oleh RASDIAN SETIADI, S.IP., MM. yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh pejabat structural sebagaimana terdapat dalam struktur organisasi dibawah ini:





D. Isu Strategis

Isu isu strategis yang akan dihadapi oleh Dinas Perhubungan Kota Bandung dalam 5 (tiga) tahun ke depan yaitu :

- Penanganan kemacetan di 4 ruas jalan pada tahun 2025
- Penanganan kemacetan di 4 ruas jalan pada tahun 2026
- Penanganan kemacetan di 4 ruas jalan pada tahun 2027
- Penanganan kemacetan di 4 ruas jalan pada tahun 2028
- Penanganan kemacetan di 4 ruas jalan pada tahun 2029

Sesuai hasil survey yang dilakukan terhadap 115 ruas jalan sampai dengan akhir 2024 ternyata masih ada 32 ruas jalan masih dalam kategori macet / Level of Service ada di level D dan E. Dari hasil survey tersebut dapat diketahui bahwa terdapat aspek penyebab kemacetan. Adapun yang menjadi aspek penyebab kemacetan diantaranya :

a. Urusan Perhubungan

1. Ngetem Angkutan Umum
2. Parkir Liar On Street
3. Penyebrangan Jalan/Gerakan Pejalan Kaki
4. APILL Persimpangan
5. Disiplin Pengemudi Angkutan Umum
6. Marka/Rambu belum ada/kurang
7. U-Turn

b. Urusan Non Perhubungan

1. Aksesibilitas Gang/Jalan
2. Aksesibilitas keluar masuk area pertokoan/pendidikan
3. Pasar Tumpah
4. PKL
5. Banjir/Genangan
6. Kualitas/kondisi infrastruktur jalan
7. Perlintasan Sebidang KA
8. Volume lalulintas yang tinggi



E. Landasan Hukum

LKIP Kota Bandung ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Kota Bandung nomor 8 tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029.
8. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 9 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah.



F. Sistematika

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Bandung Kota Bandung Tahun 1 adalah :

BAB I PENDAHULUAN

Meliputi Gambaran Umum, Tugas dan Fungsi, Isu Strategis yang dihadapi SKPD, Dasar Hukum dan Sistematika.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Meliputi Perencanaan Strategis sebelum dan setelah reuiu.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Meliputi Capaian IKU, Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja serta Akuntabilitas Keuangan.

BAB IV PENUTUP



BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025 ini, mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

2.1 Perencanaan Strategis Sebelum Reviu

A. Rencana Strategis

Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Bandung adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistimatis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Dinas Perhubungan Kota Bandung. Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Bandung yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029 ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandung Nomor KP.02.02/5023-Dishub/IX/2025 Tahun 2025 tentang Penetapan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Bandung Tahun 2025-2029. Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggung jawaban Wali Kota Bandung terkait dengan penetapan / kebijakan bahwa Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Bandung dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel.

Renstra Dinas Perhubungan Kota Bandung tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2025-2029.

Penyusunan Renstra Dinas Perhubungan Kota Bandung telah melalui tahapan - tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Kota Bandung Tahun 2025-2029 dengan melibatkan stakeholders pada saat



dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Forum SKPD, sehingga Renstra Dinas Perhubungan Kota Bandung merupakan hasil kesepakatan bersama antara Dinas Perhubungan Kota Bandung dan stakeholder.

Selanjutnya, Renstra Dinas Perhubungan Kota Bandung tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kota Bandung yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Didalam Renja Dinas Perhubungan Kota Bandung dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

1. Visi

Visi adalah gambaran kondisi ideal yang diinginkan pada masa mendatang oleh pimpinan dan seluruh staf Dinas Perhubungan Kota Bandung. Visi tersebut mengandung makna bahwa Kota Bandung dengan potensi, keragaman dan kompleksitas masalah yang tinggi, harus mampu dibangun menuju Kota Bandung yang Bermartabat serta Unggul, Nyaman dan Sejahtera

Visi Dinas Perhubungan Kota Bandung Tahun 2025-2029 adalah :

"MEWUJUDKAN KOTA BANDUNG YANG UNGGUL, TERBUKA, AMANAH, MAJU DAN AGAMIS MELALUI PEMERINTAHAN YANG BERORIENTASI MELAYANI SERTA BERKELANJUTAN DALAM MENDUKUNG PEMBANGUNAN NASIONAL"

2. Misi

Sedangkan untuk mewujudkan Visi Dinas Perhubungan Kota Bandung Tahun 2025-2029 tersebut diatas dilaksanakan Misi sebagai berikut :

- a. Mewujudkan Kota Bandung yang Maju, Kreatif, dan Berdaya Saing Dalam Perekonomian dan Infrastruktur yang Merata dan Berkelanjutan



3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Istansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu / tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi Dinas Perhubungan Tahun 2025-2029 sebanyak 2 sasaran strategis.

Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan, untuk keberhasilan tersebut perlu ditetapkan tujuan, sasaran berikut indikator dan target Dinas Perhubungan Kota Bandung sebagai berikut :

Tabel 2.1
Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja
Dinas Perhubungan Kota Bandung

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN				
				2025	2026	2027	2028	2029
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatnya Kelayakhunian Kota Aspek Infrastruktur Transportasi	Menurunnya Aspek Penyebab Kemacetan Urusan Perhubungan	Persentase Penurunan aspek Penyebab Kemacetan Urusan Perhubungan	16.27	15.40	14.16	12.42	9.81
			Persentase peningkatan pengguna sarana angkutan umum	23.24	23.49	23.74	23.99	24.24
		Meningkatnya kinerja serta kualitas sumber daya manusia dan layanan administrasi perkantoran perangkat daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	85.73	85.74	85.75	85.76	85.77



B. Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Pemerintah Kota Bandung telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk tingkat Pemerintah Daerah dan masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah melalui Keputusan Wali Kota Bandung Nomor : KP.02.02/6248-Dishub/XI/2025 Tahun 2025 tentang Indikator Kinerja Utama RPJMD Kota Bandung dan Indikator Kinerja Utama SKPD Tahun 2025-2029.

Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan Kota Bandung tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama
Dinas Perhubungan Kota Bandung Tahun 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN		
				ALASAN	FORMULASI / RUMUS PERITUNGAN	SUMBER DATA
1	Menurunnya Aspek Penyebab Kemacetan Urusan Perhubungan	Persentase Penurunan aspek Penyebab Kemacetan Urusan Perhubungan	%	Permenhub 96 tahun 2015 dan MKJI 1997	Jumlah aspek penyebab kemacetan urusan perhubungan dibagi jumlah total aspek penyebab kemacetan urusan perhubungan x 100%	Dinas Perhubungan
		Persentase peningkatan pengguna sarana angkutan umum	%	Pengguna angkutan pribadi masih mendominasi pengguna sarana transportasi di jalan sehingga kapasitas jalan semakin lama semakin padat	Jumlah pengguna angkutan umum dibagi (jumlah pengguna angkutan umum + jumlah pengguna angkutan pribadi) x 100%	Dinas Perhubungan



2	Meningkatnya kinerja serta kualitas sumber daya manusia dan layanan administrasi perkantoran perangkat daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	Permenpan no 14 tahun 2017	NRR per Responden=Jumlah Nilai Responden / Jumlah Responden NRR tertimbang per unsur = NRR per Responden / 9 Nilai indeks = Jumlah NRR tertimbang per unsur IKM Pelayanan = Nilai Indeks x (100% : 4 indeks)	Dinas Perhubungan
---	---	----------------------------	--------	----------------------------	--	-------------------

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencana kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Kinerja Dinas Perhubungan Kota Bandung Tahun 2025 mengacu pada dokumen Renstra Dinas Perhubungan Kota Bandung Tahun 2025-2029, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2025, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025, dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2025, Dinas Perhubungan Kota Bandung telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Dinas Perhubungan Kota Bandung
Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Menurunnya Aspek Penyebab Kemacetan Urusan Perhubungan	Persentase Penurunan aspek Penyebab Kemacetan Urusan Perhubungan	16.27
		Persentase peningkatan pengguna sarana angkutan umum	23.24
2	Meningkatnya kinerja serta kualitas sumber daya manusia dan layanan administrasi perkantoran perangkat daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	85.73

2.2 Perencanaan Strategis Hasil Reviu

Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Pemerintah Kota Bandung juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, baik tingkat Pemerintah Daerah maupun tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi.

Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja Dinas dilakukan reviu terhadap Perencanaan Strategis, Indikator Kinerja Utama dan Perjanjian Kinerja Dinas Perhubungan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Bandung. Hasil reviu tersebut selanjutnya menjadi salah satu dasar perencanaan kinerja dan penyusunan Laporan akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perhubungan Tahun 2025, sebagai berikut :



A. Rencana Strategis Hasil Reviu

Hasil reviu pada rencana strategis Dinas Perhubungan terutama memperhatikan indikator dan target kinerja pada seluruh sasaran dengan maksud agar menggambarkan keberhasilan tujuan dan atau sasaran. Hasil reviu selanjutnya menjadi lembar kerja tambahan pada Rencana Strategis Dinas Perhubungan Tahun 2025

Beberapa cacatan dan rekomendasi yang diperoleh dalam pelaksanaan reviu Rencana strategis Dinas Perhubungan di lingkungan Pemerintah Kota Bandung antara lain :

1. Peraturan Walikota Nomor 101 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Bandung Diganti dengan Perwal SOTK Dinas terbaru perwal 9 Tahun 2024
2. Terdapat Perbedaan Program Prioritas Daerah yang terdapat antara RPJMD dan Renstra
3. Terdapat Perbedaan IKK pada Dishub yang tertera pada RPJMD dan Renstra
4. Terdapat Penurunan Target IKD yang Konektivi ditetapkan pada Renstra Dinas Perhubungan Tahun 2026 pada Indikator Konektivitas Kabupaten/Kota
5. Pada RPJMD, terdapat IKD "Penurunan Intensitas Emisi GRK" (Ton Co2eq IDR Milyar) namun tidak terdapat pada Renstra Dishub.

Berdasarkan hasil reviu dan tindaklanjut perbaikan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Tahun 2025 tersebut, selanjutnya diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 2.4
Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja Hasil Reviu
Dinas Perhubungan Kota Bandung

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2025	2026	2027	2028	2029
1	Meningkatnya Kelayakhunian Kota Aspek Infrastruktur Transportasi	Menurunnya Aspek Penyebab Kemacetan Urusan Perhubungan	Persentase Penurunan aspek Penyebab Kemacetan Urusan Perhubungan	%	16.27	15.40	14.16	12.42	9.81
			Persentase peningkatan pengguna sarana angkutan umum	%	23.24	23.49	23.74	23.99	24.24
		Meningkatnya kinerja serta kualitas sumber daya manusia dan layanan administrasi perkantoran perangkat daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	85.73	85.74	85.75	85.76	85.77

B. Indikator Kinerja Utama Hasil Reviu

Bersamaan dengan reviu rencana strategis juga dilakukan reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perhubungan serta menghasilkan penjelasan tentang Indikator berupa formulasi pengukuran dan kriteria indikator kinerja agar berorientasi hasil.

Berikut ini Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan hasil reviu berikut penjelasannya yang diuraikan pada table berikut :



Tabel 2.5
Indikator Kinerja Utama, Formulasi Pengukuran dan Kriteria Indikator Kinerja Hasil Reviu
Dinas Perhubungan Kota Bandung Tahun 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	ALASAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	KETERANGAN/KRITERIA
1	Menurunnya Aspek Penyebab Kemacetan Urusan Perhubungan	Persentase Penurunan aspek Penyebab Kemacetan Urusan Perhubungan	%	Permenhub 96 tahun 2015 dan MKJI 1997	Jumlah aspek penyebab kemacetan urusan perhubungan dibagi jumlah total aspek penyebab kemacetan urusan perhubungan x 100%	Dinas Perhubungan	Aspek penyebab kemacetan dapat dinyatakan teratasi apabila di Ruas Jalan tersebut tingkat pelayanan ada di Level C, B dan A (kecepatan ≥ 21 km/jam dan v/c ratio $\leq 0,8$)
		Persentase peningkatan pengguna sarana angkutan umum	%	Pengguna angkutan pribadi masih mendominasi pengguna sarana transportasi di jalan sehingga kapasitas jalan semakin lama semakin padat	Jumlah pengguna angkutan umum dibagi (jumlah pengguna angkutan umum + jumlah pengguna angkutan pribadi) x 100%	Dinas Perhubungan	Sarana angkutan umum adalah sarana angkutan yang dapat dinikmati oleh masyarakat umum.



Dinas Perhubungan

2	Meningkatnya kinerja serta kualitas sumber daya manusia dan layanan administrasi perkantoran perangkat daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	Permenpan no 14 tahun 2017	<p>NRR per Responden=Jumlah Nilai Responden / Jumlah Responden</p> <p>NRR tertimbang per unsur = NRR per Responden / 9</p> <p>Nilai indeks = Jumlah NRR tertimbang per unsur</p> <p>IKM Pelayanan = Nilai Indeks x (100% : 4 indeks)</p>	Dinas Perhubungan	Semakin tinggi nilai indeks yang diperoleh maka semakin baik pelayanan Dishub terhadap masyarakat dan tingkat kepuasan masyarakatnyasemakin tinggi.
---	---	----------------------------	--------	----------------------------	--	-------------------	---



C. Perjanjian Kinerja Hasil Reviu

Sesuai dengan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Perhubungan hasil reviu dan sebagai bahan yang diperjanjikan oleh Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandung dengan Wali Kota Bandung dan besaran anggaran yang direncanakan melalui Program / Kegiatan pada Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.6
Perjanjian Kinerja Hasil Reviu
Dinas Perhubungan Kota Bandung Tahun 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	IKU / INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Menurunnya Aspek Penyebab Kemacetan Urusan Perhubungan	Persentase Penurunan aspek Penyebab Kemacetan Urusan Perhubungan	%	16.27
		Persentase peningkatan pengguna sarana angkutan umum	%	23.24
2	Meningkatnya kinerja serta kualitas sumber daya manusia dan layanan administrasi perkantoran perangkat daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	85.73



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Dinas Perhubungan Kota Bandung selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Perhubungan Kota Bandung yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2025-2029 maupun Rencana Kerja Tahun 2025 Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Visi dan Misi Dinas Perhubungan.

A. Kerangka Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU)



diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sebagai berikut :

Persentase	Predikat	Kode Warna
< 100%	Tidak Tercapai	Merah
= 100%	Tercapai/ Sesuai Target	Hijau
> 100%	Melebihi Target	Biru

Dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja yang tidak tercapai (< 100%) dengan pendekatan Permendagri nomor 54 Tahun 2010, sebagai berikut :

**Pencapaian Kinerja Sasaran Dinas Perhubungan Kota Bandung
Tahun 2025**

No	Kategori/Interpretasi	Rata-Rata % Capaian	Kode Warna
1	Sangat Baik	> 90	Biru Tua
2	Baik	75.00 – 89.99	Hijau
3	Cukup	65.00 – 74.99	Jingga
4	Kurang	50.00 – 64.99	Kuning
5	Sangat Kurang	0 – 49.99	Merah



Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, Dinas Perhubungan Kota Bandung dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2025-2029 maupun Rencana Kerja Tahun 2025. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Dinas Perhubungan Tahun 2025, hasil reviu dan Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan berdasarkan Keputusan Wali Kota Bandung Nomor : KP.02.02/6248-Dishub/XI/2025 Tahun 2025, telah ditetapkan sebanyak 2 sasaran dan sebanyak 3 indikator kinerja (out comes) dengan rincian sebagai berikut :

- Sasaran 1 terdiri dari 2 indikator
- Sasaran 2 terdiri dari 1 indikator

B. Capaian Indikator Kinerja Utama

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dinas Perhubungan Kota Bandung telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah Nomor KP.02.02/6248-Dishub/XI/2025 tanggal 14 November 2025 dan melalui Keputusan Wali Kota Bandung Nomor : tentang Indikator Kinerja Utama Kota



Bandung. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Dinas Perhubungan Kota Bandung juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi.

Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Dinas Perhubungan Kota Bandung tahun 2025 menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.1
Capaian Indikator Kinerja Utama
Dinas Perhubungan Kota Bandung
Tahun 2025

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
1	Persentase Penurunan aspek Penyebab Kemacetan Urusan Perhubungan	%	16.27	16.40	99.20
2	Persentase peningkatan pengguna sarana angkutan umum	%	23.24	22.20	95.52
3	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	85.73	87.83	102.45

Dari tabel tersebut terlihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut :

Capaian kinerja yang lebih/melampaui target ditunjukkan pada indikator Indeks Kepuasan Masyarakat, dengan capaian kinerja 102.45 %.

Capaian kinerja yang tidak mencapai target 100% ditunjukkan pada indikator Persentase Penurunan aspek Penyebab Kemacetan Urusan Perhubungan, dengan capaian kinerja 99.20 %, pada indikator Persentase peningkatan pengguna sarana angkutan umum, dengan capaian kinerja 95.52 %.



Dalam hal ini dibutuhkan sinergi antar dinas untuk mengatasi masalah transportasi secara menyeluruh di Kota Bandung, antara lain seperti :

- 1) **Dinas Sumber Daya Air dan Mineral (DSDABM)** → Bertanggung jawab atas infrastruktur jalan, drainase, dan perbaikan jalan berlubang yang dapat mengurangi kecelakaan lalu lintas.
- 2) **Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang** → Berperan dalam perencanaan tata kota agar transportasi publik lebih terintegrasi dengan kawasan permukiman.
- 3) **Dinas Pendidikan** → Berperan dalam edukasi keselamatan berlalu lintas bagi pelajar agar meningkatkan kesadaran masyarakat sejak dini.
- 4) **Satlantas Polrestabes Bandung** → Berperan dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas dan peningkatan disiplin pengguna jalan.

C. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Secara umum Dinas Perhubungan Kota Bandung telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2025-2029. Jumlah Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi Dinas Perhubungan Kota Bandung Tahun 2025-2029 sebanyak 2 sasaran.

Tahun 2025 adalah tahun ke 1 pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Perhubungan, dari sebanyak 2 sasaran strategis dengan sebanyak 3 indikator kinerja yang ditetapkan maka pencapaian kinerja sasaran Dinas Perhubungan Kota Bandung adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2
Capaian Indikator Kinerja
Dinas Perhubungan Kota Bandung Tahun 2025

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
1	Persentase Penurunan aspek Penyebab Kemacetan Urusan Perhubungan	%	16.27	16.40	99.20
2	Persentase peningkatan pengguna sarana angkutan umum	%	23.24	22.20	95.52
3	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	85.73	87.83	102.45



Berdasarkan pengukuran kinerja tersebut di atas dapat diperoleh data dan informasi kinerja Dinas pada beberapa table berikut :

Tabel 3.3
Pencapaian Kinerja Sasaran
Dinas Perhubungan Kota Bandung Tahun 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	CAPAIAN
1	Melebihi/Melampaui Target	33.33 %
2	Sesuai Target	0.00 %
3	Tidak Mencapai Target	66.67 %

Adapun pencapaian kinerja sasaran dirinci dalam tabel, sebagai berikut:

Dari sebanyak 2 Sasaran diatas, pencapaian realisasi indikator kinerja sasaran terhadap target yang sudah ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 3.4
Pencapaian target Misi

No	Misi	Jumlah Indikator Sasaran	Tingkat Pencapaian					
			Melampaui target		Sesuai Target		Belum Mencapai Target	
			Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	Misi 1	3	1	33.33	0	0.00	2	66.67
	Jumlah	3	1	33.33	0	0.00	2	66.67

Dari sebanyak 2 sasaran dengan sebanyak 3 indikator kinerja, pencapaian kinerja Dinas Perhubungan Kota Bandung dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.5
Kategori Pencapaian Indikator Sasaran

No	Kategori	Jumlah Indikator	Persentase
A.	Misi 1	3	
1	Melebihi/Melampaui Target	1	33.33 %



2	Sesuai Target	0	0.00 %
3	Tidak Mencapai Target	2	66.67 %

Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang. Selain itu, dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisis.

Dalam melakukan evaluasi kinerja, perlu juga digunakan pembandingan-pembandingan antara lain :

- kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan.
- kinerja nyata dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya.
- Kinerja nyata dengan target akhir renstra.
- kinerja suatu instansi dengan kinerja instansi lain yang unggul di bidangnya ataupun dengan kinerja sektor swasta.
- kinerja nyata dengan kinerja di instansi lain atau dengan standar nasional.

Selanjutnya pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai pada tahun 2025 dan membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran dari sebanyak 2 sasaran dan sebanyak 3 indikator kinerja dari sebanyak 1 Misi, sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Perhubungan Kota Bandung tahun 2025-2029, analisis pencapaian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan secara rinci dapat dilihat sebagai berikut :



Sasaran 1

Menurunnya Aspek Penyebab Kemacetan Urusan Perhubungan

Pencapaian sasaran 1 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.6
Analisis Pencapaian Sasaran 1
Menurunnya Aspek Penyebab Kemacetan Urusan Perhubungan

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2024		%	Tahun 2025		%
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Persentase Penurunan aspek Penyebab Kemacetan Urusan Perhubungan	%	16.77	16.77	100.00	16.27	16.40	99.20
2	Persentase peningkatan pengguna sarana angkutan umum	%	22.99	22.99	100.00	23.24	22.20	95.52

Sasaran Menurunnya Aspek Penyebab Kemacetan Urusan Perhubungan dapat dilihat dari sebanyak 2 indikator yaitu :

Dari 805 aspek penyebab kemacetan, di tahun 2024 tersisa sebanyak 135 aspek penyebab kemacetan urusan perhubungan sehingga Persentase Penurunan aspek Penyebab Kemacetan Urusan Perhubungan pada tahun 2024 sebesar 16.77%

Pada Triwulan 1 Tahun 2025 jumlah aspek penyebab kemacetan urusan perhubungan yang teratasi sebanyak 1 aspek di jalan Tamblong. Capaian kinerja Persentase Penurunan aspek Penyebab Kemacetan Urusan Perhubungan sebesar $134/805 \times 100\% = 16.65\%$ dengan target 16.65%, sehingga dapat dikatakan Persentase Penurunan aspek Penyebab Kemacetan Urusan Perhubungan sudah mencapai target sebesar 100%.

Kemudian pada Triwulan 2 Tahun 2025 jumlah aspek penyebab kemacetan urusan perhubungan yang teratasi sebanyak 1 aspek di jalan Pajajaran sehingga sampai triwulan 2 sudah tertangani sebanyak 2 aspek penyebab kemacetan. Capaian kinerja Persentase Penurunan aspek Penyebab Kemacetan Urusan Perhubungan sebesar $133/805 \times 100\% = 16.52\%$ dengan target 16.52%, sehingga dapat dikatakan Persentase Penurunan aspek Penyebab Kemacetan Urusan Perhubungan sudah mencapai target sebesar 100%.



Dan pada Triwulan 3 Tahun 2025 jumlah aspek penyebab kemacetan urusan perhubungan yang teratasi sebanyak 1 aspek di Jalan Sulanjana sehingga sampai triwulan 3 sudah tertangani sebanyak 3 aspek penyebab kemacetan. Capaian kinerja Persentase Penurunan aspek Penyebab Kemacetan Urusan Perhubungan sebesar $132/805 \times 100\% = 16.40\%$ dengan target 16.40%, sehingga dapat dikatakan presentase penurunan kemacetan lingkup urusan perhubungan sudah mencapai target sebesar 100%.

Pada Triwulan 4 Tahun 2025 jumlah aspek penyebab kemacetan urusan perhubungan yang teratasi sebanyak 0 aspek dari target 1 aspek di Jalan Prof. Dr. Ir. Sutami, sehingga sampai triwulan 4 hanya tertangani sebanyak 3 aspek penyebab kemacetan dari target 4 aspek. Capaian kinerja Persentase Penurunan aspek Penyebab Kemacetan Urusan Perhubungan sebesar $132/805 \times 100\% = 16.40\%$ dengan target 16.27%, sehingga dapat dikatakan Persentase Penurunan aspek Penyebab Kemacetan Urusan Perhubungan belum mencapai target, hanya sebesar 99.20%. Pada triwulan 4 ini target tidak tercapai karena kemacetan di ruas jalan Prof. Dr. Ir. Sutami tidak tertangani.

Capaian kinerja nyata indikator 1 "Persentase Penurunan aspek Penyebab Kemacetan Urusan Perhubungan" adalah sebesar 16.40 dari target sebesar 16.27 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sehingga persentase capaian kerjanya adalah 99.20 %, capaian ini tidak mencapai target yang diperjanjikan.

Realisasi kinerja tahun ini sebesar 99.20% meningkat dari realisasi kinerja tahun sebelumnya sebesar 98.42%.

Tahun 2025 adalah tahun ke 1 renstra, capaian kinerja indikator 1 "Persentase Penurunan aspek Penyebab Kemacetan Urusan Perhubungan" tahun ini adalah sebesar 99.20 %, bila dibandingkan dengan target akhir renstra Dinas Perhubungan maka capaian kerjanya mencapai 59.82 %.

Capaian kinerja nyata indikator 2 "Persentase peningkatan pengguna sarana angkutan umum" adalah sebesar 22.20 dari target sebesar 23.24 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sehingga persentase capaian kerjanya adalah 95.52 %, capaian ini tidak mencapai target yang diperjanjikan.



Tahun 2025 adalah tahun ke 1 renstra, capaian kinerja indikator 2 "Persentase peningkatan pengguna sarana angkutan umum" tahun ini adalah sebesar 95.52 %, bila dibandingkan dengan target akhir renstra Dinas Perhubungan maka capaian kerjanya mencapai 91.58 %.

Capaian kinerja sasaran 1 ini belum dapat dibandingkan dengan capaian kinerja instansi lainnya di Kota/Kabupaten lain karena indikator di tiap Kota/Kabupaten berbeda-beda, dan sampai saat laporan ini dibuat belum mendapatkan Kota/Kabupaten lain yang menggunakan indikator yang sama, namun untuk indikator "Persentase peningkatan pengguna sarana angkutan umum" terdapat 1 kota yang memiliki indikator serupa yaitu Kota Medan dengan indikator "Persentase Kenaikan Jumlah Penumpang Pada Angkutan Umum".

Capaian kinerja sasaran 1 ini juga tidak dapat dibandingkan dengan standar nasional mengingat belum ada ketetapan resmi dari Kementerian Perhubungan Republik Indonesia tentang standar dari ke 5 indikator diatas.

Dalam melaksanakan program-program untuk mendukung capaian Persentase Tingkat pelayanan jalan terdapat beberapa factor pendukung, hambatan serta solusi sebagai berikut:

Faktor Pendukung :

1. Adanya kerja sama yang baik antar stake holder dalam menangani kemacetan di 4 ruas jalan yang telah ditentukan.

Faktor Penghambat :

1. Kurang disiplinnya pengguna jalan dalam menaati peraturan lalu lintas.
2. Keterbatasan kewenangan urusan perhubungan terhadap beberapa faktor penyebab kemacetan; koordinasi lintas perangkat daerah belum optimal; keterbatasan sumber daya dan anggaran; munculnya titik kemacetan baru.
3. Terbatasnya petugas di lapangan.
4. Fasilitas sarana prasarana angkutan umum massal belum optimal sehingga masih banyak yang enggan menggunakan kendaraan umum dan lebih memilih menggunakan kendaraan pribadi.
5. Pertumbuhan kendaraan lebih besar dibanding pertumbuhan jalan



Solusi :

1. Penguatan koordinasi lintas perangkat daerah, prioritas penanganan sesuai kewenangan, serta pemetaan dan pemutakhiran data titik kemacetan secara berkala
2. Menambah jumlah petugas di lapangan.
3. Melengkapi fasilitas sarana dan prasarana angkutan umum agar pengguna kendaraan pribadi mau berpindah menggunakan kendaraan umum.
4. Bekerja sama dengan instansi lain untuk menambah kapasitas jalan dan mengurangi hambatan samping.

Analisis tentang efisiensi penggunaan sumber daya dapat dijelaskan sebagai berikut: Dari jumlah anggaran program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ) yang tersedia sebesar Rp 165.104.674.742 (APBD dan BLUD) dapat terealisasi sebesar Rp. 149.279.706.839 atau sebesar 90.42%, secara Capaian kinerja sebesar 97.36% sehingga didapat tingkat efisiensi sebesar $100.00\% - 90.42\% = 9.58\%$. Sedangkan nilai efektifitas didapat sebesar $100.00\% / 90.42\% = 110.60\%$. untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut :

No	Sasaran	Indikator		Satuan	Kinerja			Keuangan			
					Target	Realisasi	(%)	Program	Pagu	Realisasi	%
1	Menurunnya Aspek Penyebab Kemacetan Urusan Perhubungan	1.1	Persentase Penurunan aspek Penyebab Kemacetan Urusan Perhubungan	%	16.27	16.40	99.20	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	165.104.674.742	149.279.706.839	90%
		1.2	Persentase peningkatan pengguna sarana angkutan umum	%	23.24	22.20	95.52				
		RATA-RATA CAPAIAN DARI 2 INDIKATOR							97.36	TOTAL PER SASARAN	165.104.674.742

Untuk mendukung pencapaian persentase tingkat pelayanan jalan tentunya dijabarkan ke dalam program, kegiatan, sub kegiatan. Berikut analisis program, kegiatan, dan sub kegiatan yang menjadi penunjang keberhasilan pencapaian kinerja sasaran 1 yaitu :



NO	Program/kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Out put	Anggaran	Penyerapan	Analisis
A	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase aspek Penyebab Kemacetan Urusan Perhubungan yang tertangani	0.37%	165.104.674.742	149.279.706.839	- Data eksisting ada 805 aspek, 66 aspek masih kategori merah, tahun ini sudah diselesaikan 4 aspek jadi tinggal 62 aspek. Formula perhitungan $62/805 = 7.70\%$
		Indeks fatalitas 10.000 kendaraan lingkup pilar kendaraan yang berkeselamatan	0.920 Indeks			Indeks Fatalitas = (Jumlah Korban meninggal dunia / jumlah kendaraan terdaftar) x 10.000 Dengan jumlah korban meninggal dunia pada Tahun 2024 sebanyak 642 jiwa
		Indeks fatalitas 100.000 penduduk lingkup pilar kendaraan yang berkeselamatan	5.479 Indeks			Indeks Fatalitas = (Jumlah Korban meninggal dunia / jumlah penduduk) x 100.000 Dengan jumlah korban meninggal dunia pada Tahun 2024 sebanyak 642 jiwa
		Persentase konektivitas jalan yang sudah terlayani angkutan umum	38.97 %			Panjang jalan terlayani angkutan umum s/d Tahun 2025 yaitu 40,37 km dari total panjang jalan di kota bandung sebesar 1480.8 km
		Rasio Pengguna Angkutan umum vs Pengguna Angkutan Pribadi	1 : 3.505			Berdasarkan hasil kajian jumlah penumpang angkutan umum sebanyak 97.010 orang, jumlah penumpang kendaraan pribadi sebanyak 340.093 orang. Formula perhitungan $97.010/340.093 = 1/3.505$
1	Kegiatan Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi	16 Dokumen	2.607.565.531	2.336.825.900	Dari target 16 dokumen telah terealisasi 16 dokumen dengan capaian kinerja = $Realisasi/target \times 100\% = 16/16 \times 100\% = 107\%$
	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi bidang perhubungan	16 Dokumen	2.607.565.531	2.336.825.900	Dari target 16 dokumen telah terealisasi 16 dokumen dengan capaian kinerja = $Realisasi/target \times 100\% = 16/16 \times 100\% = 107\%$
2	Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah jenis perlengkapan jalan yang tersedia	6 Jenis	104.575.829.830	92.724.049.838	Dari target 7 jenis telah terealisasi 6 jenis dengan capaian kinerja = $Realisasi/target \times 100\% = 6/7 \times 100\% = 86\%$
		Jumlah jenis prasarana jalan yang tersedia	5 Jenis			Dari target 5 jenis telah terealisasi 5 jenis dengan capaian kinerja = $Realisasi/target \times 100\% = 5/5 \times 100\% = 100\%$
	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Jembatan penyeberangan orang yang dibangun	1 Unit	61.578.350.252	54.825.491.727	Dari target 1 unit telah terealisasi 1 unit dengan capaian kinerja = $Realisasi/target \times 100\% = 1/1 \times 100\% = 100\%$
		Jumlah PJU yang dibangun	641 Unit			Dari target 501 unit telah terealisasi 641 unit dengan capaian kinerja = $Realisasi/target \times 100\% = 641/501 \times 100\% = 128\%$
		Jumlah PJL yang dibangun	4244 Unit			Dari target 4227 buah telah terealisasi 4244 buah dengan capaian kinerja = $Realisasi/target \times 100\% = 4244/4227 \times 100\% = 100.40\%$
		Jumlah halte yang dibangun	25 Unit			Dari target 20 unit telah terealisasi 25 unit dengan capaian kinerja = $Realisasi/target \times 100\% = 25/20 \times 100\% = 125\%$
Jumlah doc bike sharing yang	3 Unit	Dari target 2 unit telah terealisasi 3 unit dengan capaian kinerja =				



		dibangun				Realisasi/targetx100% = $3/2 \times 100\% = 150\%$
		Jumlah doc bike sharing electric yang dibangun	-			Dari target 2 unit telah terealisasi 0 unit dengan capaian kinerja = Realisasi/targetx100% = $0/2 \times 100\% = 0\%$ (target tidak tercapai)
		Jumlah signage yang dibangun	10 Buah			Dari target 11 buah telah terealisasi 10 buah dengan capaian kinerja = Realisasi/targetx100% = $10/11 \times 100\% = 91\%$
	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah rambu lalu lintas yang terpasang	250 Buah	14.265.925.001	13.556.721.451	Dari target 250 buah telah terealisasi 250 buah dengan capaian kinerja = Realisasi/targetx100% = $250/250 \times 100\% = 100\%$
		Jumlah marka jalan (Thermo plactic) yang terpasang	50000 m'			Dari target 50000 m' telah terealisasi 50000 m' dengan capaian kinerja = Realisasi/targetx100% = $50000/50000 \times 100\% = 100\%$
		Jumlah cermin tikungan yang terpasang	390 buah			Dari target 390 buah telah terealisasi 390 buah dengan capaian kinerja = Realisasi/targetx100% = $390/390 \times 100\% = 100\%$
		Jumlah warning light yang terpasang	33 unit			Dari target 33 unit telah terealisasi 33 unit dengan capaian kinerja = Realisasi/targetx100% = $33/33 \times 100\% = 100\%$
		Jumlah marka jalan (Cold plastic) yang terpasang	2500 m2			Dari target 2500 m2 telah terealisasi 2500 m2 dengan capaian kinerja = Realisasi/targetx100% = $2500/2500 \times 100\% = 100\%$
		jumlah marka jalan parkir yang terpasang	10000 m2			Dari target 10000 m2 telah terealisasi 10000 m2 dengan capaian kinerja = Realisasi/targetx100% = $10000/10000 \times 100\% = 100\%$
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah Jembatan Penyeberangan orang yang dipelihara	5 Unit	22.703.843.917	18.871.254.955	Dari target 6 Unit telah terealisasi 6 Unit dengan capaian kinerja = Realisasi/targetx100% = $6/6 \times 100\% = 100\%$
		Jumlah halte yang dipelihara	6 Unit			Dari target 10 Unit telah terealisasi 6 Unit dengan capaian kinerja = Realisasi/targetx100% = $6/10 \times 100\% = 60\%$
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah titik ATCS yang dipelihara	146 Titik	6.027.710.660	5.470.581.705	Dari target 146 titik telah terealisasi 146 titik dengan capaian kinerja = Realisasi/targetx100% = $146/146 \times 100\% = 100\%$
3	Kegiatan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Jumlah Terminal Penumpang Tipe C yang Dikelola (Lokasi)	9 Lokasi	6.309.414.806	5.865.718.376	Dari target 10 lokasi telah terealisasi 9 lokasi dengan capaian kinerja = Realisasi/targetx100% = $10/9 \times 100\% = 111\%$
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Jumlah terminal tipe C yang dipelihara	9 Unit	5.865.718.376	5.865.718.376	Dari target 10 lokasi telah terealisasi 9 lokasi dengan capaian kinerja = Realisasi/targetx100% = $10/9 \times 100\% = 111\%$
4	Kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Kendaraan yang diuji	66000 Unit	7.474.149.368	6.965.866.507	Dari target 66000 unit telah terealisasi 66000 unit dengan capaian kinerja = Realisasi/targetx100% = $66000/66000 \times 100\% = 100\%$
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala	Jumlah sarana prasarana pengujian kendaraan bermotor	1 Set	660.146.207	647.171.612	Dari target 1 set telah terealisasi 1 set dengan capaian kinerja = Realisasi/targetx100% = $1/1 \times 100\% =$



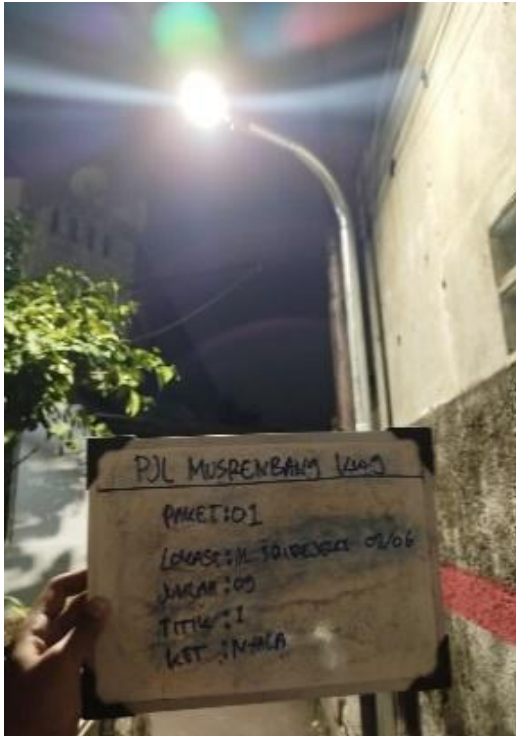
	Kendaraan Bermotor					100%
	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Uji petik emisi gas buang kendaraan bermotor	6 kali	86.648.905	84.670.800	Dari target 6 kali telah terealisasi 6 kali dengan capaian kinerja = $\text{Realisasi/target} \times 100\% = 6/6 \times 100\% = 100\%$
	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	12 Dokumen	3.404.622.707	3.323.463.570	Dari target 12 dokumen telah terealisasi 12 dokumen dengan capaian kinerja = $\text{Realisasi/target} \times 100\% = 12/12 \times 100\% = 100\%$
	Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	4 Laporan	1.827.881.376	1.534.480.545	Dari target 4 laporan telah terealisasi 4 laporan dengan capaian kinerja = $\text{Realisasi/target} \times 100\% = 4/4 \times 100\% = 100\%$
	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang dipelihara	5 Set	1.494.850.173	1.376.079.980	Dari target 1 set telah terealisasi 5 set dengan capaian kinerja = $\text{Realisasi/target} \times 100\% = 5/1 \times 100\% = 500\%$
5	Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Laporan manajemen dan penataan rekayasa lalu lintas	4 Laporan	1.015.614.632	766.011.980	Dari target 4 laporan telah terealisasi 4 laporan dengan capaian kinerja = $\text{Realisasi/target} \times 100\% = 4/4 \times 100\% = 100\%$
		Laporan pelaksanaan forum Lalu lintas dan Angkutan Jalan Raya	4 Laporan			Dari target 4 laporan telah terealisasi 4 laporan dengan capaian kinerja = $\text{Realisasi/target} \times 100\% = 4/4 \times 100\% = 100\%$
	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	4 Laporan	459.984.032	264.834.900	Dari target 4 laporan telah terealisasi 4 laporan dengan capaian kinerja = $\text{Realisasi/target} \times 100\% = 4/4 \times 100\% = 100\%$
	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	4 Laporan	555.630.600	501.177.080	Dari target 4 laporan telah terealisasi 4 laporan dengan capaian kinerja = $\text{Realisasi/target} \times 100\% = 4/4 \times 100\% = 100\%$
6	Kegiatan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Laporan Pengaturan Lalu Lintas, kampanye publik ketertiban berlalu lintas dan pelaksanaan CFD	4 Laporan	16.778.059.542	16.061.842.700	Dari target 4 laporan telah terealisasi 4 laporan dengan capaian kinerja = $\text{Realisasi/target} \times 100\% = 4/4 \times 100\% = 100\%$
		laporan Pengendalian Disiplin Pengoprasian Angkutan di Jalan Raya	4 Laporan			Dari target 4 laporan telah terealisasi 4 laporan dengan capaian kinerja = $\text{Realisasi/target} \times 100\% = 4/4 \times 100\% = 100\%$
	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi	4 Laporan	14.165.540.542	13.468.376.500	Dari target 4 laporan telah terealisasi 4 laporan dengan capaian kinerja = $\text{Realisasi/target} \times 100\% = 4/4 \times 100\% = 100\%$



	Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota dan pelaksanaan CFD				
	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum dan penerbitan parkir liar	4 Laporan	2.612.519.000	2.593.466.200	Dari target 4 laporan telah terealisasi 4 laporan dengan capaian kinerja = $\text{Realisasi/target} \times 100\% = 4/4 \times 100\% = 100\%$
7	Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah km tempuh Pengoperasian Angkutan Massal Bus Trans Metro Bandung (TMB), dan Bus Sekolah	1389023 km	26.344.041.033	24.559.391.538	Dari target 1386462.60 km telah terealisasi 1389023 km dengan capaian kinerja = $\text{Realisasi/target} \times 100\% = 1389023 / 1386462.60 \times 100\% = 100.18\%$
Jumlah pengguna bike sharing		33247 orang	Dari target 3445 orang telah terealisasi 33247 orang dengan capaian kinerja = $\text{Realisasi/target} \times 100\% = 33247 / 3445 \times 100\% = 965\%$			
Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota		4 Laporan	Dari target 4 laporan telah terealisasi 4 laporan dengan capaian kinerja = $\text{Realisasi/target} \times 100\% = 4/4 \times 100\% = 100.00\%$			
Jumlah kendaraan khusus yang tersedia		3 Unit	Dari target 3 unit telah terealisasi 3 unit dengan capaian kinerja = $\text{Realisasi/target} \times 100\% = 3/3 \times 100\% = 100.00\%$			
Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah km tempuh Pengoperasian Angkutan Massal Bus Trans Metro Bandung (TMB)	1280777 km	21.007.227.833	19.485.119.578	Dari target 1279681 km telah terealisasi 1280777 Km dengan capaian kinerja = $\text{Realisasi/target} \times 100\% = 1280777 / 1279681 \times 100\% = 100.09\%$	
	Jumlah km tempuh Pengoperasian Angkutan Massal Bus sekolah	108246 km			Dari target 106781.60 km telah terealisasi 108246 Km dengan capaian kinerja = $\text{Realisasi/target} \times 100\% = 108246 / 106781,6 \times 100\% = 101\%$	
	Pengadaan kendaraan operasional	3 unit			Dari target 3 unit telah terealisasi 3 unit dengan capaian kinerja = $\text{Realisasi/target} \times 100\% = 3/3 \times 100\% = 100.00\%$	
	Jumlah pengguna bike sharing	33247 orang			Dari target 3445 orang telah terealisasi 33247 orang dengan capaian kinerja = $\text{Realisasi/target} \times 100\% = 33247 / 3445 \times 100\% = 965\%$	
Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	4 Laporan	5.336.813.200	5.074.271.960	Dari target 4 laporan telah terealisasi 4 laporan dengan capaian kinerja = $\text{Realisasi/target} \times 100\% = 4/4 \times 100\% = 100\%$	



Dokumentasi Sasaran 1 Menurunnya Apek Penyebab Kemacetan Urusan Perhubungan





Sasaran 2

Meningkatnya kinerja serta kualitas sumber daya manusia dan layanan administrasi perkantoran perangkat daerah

Pencapaian sasaran 2 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.7

Analisis Pencapaian Sasaran 2

Meningkatnya kinerja serta kualitas sumber daya manusia dan layanan administrasi perkantoran perangkat daerah

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2024		%	Tahun 2025		%
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	85.72	85.72	100.00	85.73	87.83	102.45

Sasaran Meningkatkan kinerja serta kualitas sumber daya manusia dan layanan administrasi perkantoran perangkat daerah dapat dilihat dari sebanyak 1 indikator yaitu :

Capaian kinerja nyata indikator 1 "Indeks Kepuasan Masyarakat" adalah sebesar 87.83 dari target sebesar 85.73 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sehingga persentase capaian kerjanya adalah 102.45 %, capaian ini melebihi target yang diperjanjikan.

Capaian kinerja nyata indikator 1 "Indeks Kepuasan Masyarakat" tahun ini meningkat 2.11 Point dari capaian tahun sebelumnya yang mencapai 100.00%

Tahun 2025 adalah tahun ke 1 renstra, capaian kinerja indikator 1 "Indeks Kepuasan Masyarakat" tahun ini adalah sebesar 102.45 %, bila dibandingkan dengan target akhir renstra Dinas Perhubungan maka capaian kerjanya mencapai 102.40 %.

Capaian kinerja nyata indikator "Kepuasan Masyarakat" Jika dibandingkan dengan kinerja instansi lainnya seperti Dinas Perhubungan Kota Bekasi dengan nilai 87.62 maka nilai Dinas Perhubungan kota Bandung masih lebih baik.

Capaian kinerja IKM Dinas Perhubungan Kota Bandung tidak dapat dibandingkan dengan standar nasional mengingat belum ada ketetapan resmi dari



Capaian kinerja IKM Dinas Perhubungan Kota Bandung tidak dapat dibandingkan dengan standar nasional mengingat belum ada ketetapan resmi dari Kementerian Perhubungan Republik Indonesia tentang standar nilai IKM bagi pelayanan di bidang perhubungan di pemerintahan daerah.

Dalam melaksanakan program-program untuk mendukung capaian Indeks Kepuasan Masyarakat terdapat beberapa faktor pendukung, hambatan serta solusi sebagai berikut:

Faktor Pendukung :

1. Kerja sama yang baik antar stake holder sehingga dirasakan pelayanannya oleh masyarakat.

Faktor Penghambat :

1. Waktu pelayanan yang dirasakan oleh masyarakat kurang cepat serta sarana dan prasarana yang kurang mendukung saat pelaksanaan pelayanan

Solusi :

1. Meningkatkan monitoring dan evaluasi untuk mengoptimalkan pelaksanaan program dan kegiatan untuk pencapaian sasaran kinerja kegiatan sesuai dengan dokumen perencanaan yang telah dibuat.
2. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) yang telah disusun menjadi bahan evaluasi kinerja di lingkungan pemerintahan khususnya di Dinas Perhubungan Kota Bandung, dan dijadikan sebagai acuan untuk perbaikan dalam penyusunan laporan tahun berikutnya.
3. Percepatan waktu pelayanan kepada masyarakat dan sarpras pelayanan yang mendukung.



Analisis tentang efisiensi penggunaan sumber daya dapat dijelaskan sebagai berikut: Dari jumlah anggaran Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang tersedia sebesar Rp 104.361.182.375 (APBD dan BLUD) dapat terealisasi sebesar Rp. 80.038.953.296 atau sebesar 76.70% dan Capaian kinerja sebesar 102.45% sehingga didapat tingkat efisiensi sebesar $102.45\% - 76.70\% = 23.56\%$. Sedangkan nilai efektifitas didapat sebesar $102.45\% / 76.70\% = 133.57\%$. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut :

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Kinerja			Keuangan			
				Target	Realisasi	(%)	Program	Pagu	Realisasi	%
2	Meningkatnya kinerja serta kualitas sumber daya manusia dan layanan administrasi perkantoran perangkat daerah	2.1 Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	85.73	87.83	102.45	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	104.351.182.375	80.038.953.296	76,70%
							TOTAL PER SASARAN	104.351.182.375	80.038.953.296	76,70%
RATA-RATA CAPAIAN DARI 1 INDIKATOR						102.45				

Untuk mendukung pencapaian persentase tingkat pelayanan jalan tentunya dijabarkan ke dalam program, kegiatan, subkegiatan. Berikut analisis program, kegiatan, dan sub kegiatan yang menjadi penunjang keberhasilan pencapaian kinerja sasaran 2 yaitu :

NO	Program/kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/kegiatan/ Sub Kegiatan	Out put	Anggaran	Penyerapan	Analisis
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah kabupaten / Kota	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	94.80%	104.351.182.375	80.038.953.296	Rata-rata capaian kinerja dari semua kegiatan di program ini
1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen capaian kinerja Perangkat Daerah	5 Dokumen	450.000.000	421.839.000	Dari target 5 dokumen telah terealisasi 5 dokumen dengan capaian kinerja = $Realisasi/target \times 100\% = 5/5 \times 100\% = 100\%$
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Dokumen	450.000.000	421.839.000	Dari target 5 dokumen telah terealisasi 5 dokumen dengan capaian kinerja = $Realisasi/target \times 100\% = 5/5 \times 100\% = 100\%$
2	Kegiatan Administrasi keuangan Perangkat Daerah	Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Laporan	45.114.950.785	43.403.916.032	Dari target 12 laporan telah terealisasi 12 laporan dengan capaian kinerja = $Realisasi/target \times 100\% = 12/12 \times 100\% = 100\%$
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah laporan pembayaran gaji dan tunjangan ASN	12 Laporan	45.114.950.785	43.403.916.032	Dari target 12 laporan telah terealisasi 12 laporan dengan capaian



						kinerja = Realisasi/targetx100% = 12/12x100% = 100%
3	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	12 Laporan	3.307.005.985	2.607.140.485	Dari target 12 Laporan telah terealisasi 12 Laporan dengan capaian kinerja = Realisasi/targetx100% = 12/12x100% = 100%
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	3 Paket	1.262.913.628	1.190.751.945	Dari target 3 paket telah terealisasi 3 paket dengan capaian kinerja = Realisasi/targetx100% = 3/3x100% = 100%
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	200 Orang	1.887.092.357	1.314.742.540	Dari target 210 orang telah terealisasi 376 orang dengan capaian kinerja = Realisasi/targetx100% = 200/210x100% = 95.24%
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	300 Orang	157.000.000	101.646.000	Dari target 681 orang telah terealisasi 300 orang dengan capaian kinerja = Realisasi/targetx100% = 300/681x100% = 44%
4	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Laporan	5.459.969.929	4.757.092.512	Dari target 12 Laporan telah terealisasi 12 Laporan dengan capaian kinerja = Realisasi/targetx100% = 12/12x100% = 100%
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	149.846.850	142.661.640	Dari target 1 Paket telah terealisasi 1 Paket dengan capaian kinerja = Realisasi/targetx100% = 1/1x100% = 100%
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	11 Paket	3.805.480.918	3.521.035.315	Dari target 14 paket telah terealisasi 14 paket dengan capaian kinerja = Realisasi/targetx100% = 14/14x100% = 100%
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	9 Paket	839.314.200	479.936.712	Dari target 12 paket telah terealisasi 9 paket dengan capaian kinerja = Realisasi/targetx100% = 9/12x100% = 75%
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	273.032.737	237.758.285	Dari target 3 paket telah terealisasi 3 paket dengan capaian kinerja = Realisasi/targetx100% = 3/3x100% = 100%
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	189.389.124	173.200.000	Dari target 12 dokumen telah terealisasi 12 dokumen dengan capaian kinerja = Realisasi/targetx100% = 12/12x100% = 100%
	Penyelenggaraan Rpat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	202.906.100	202.500.560	Dari target 12 laporan telah terealisasi 12 laporan dengan capaian kinerja =



						Realisasi/targetx100% = 12/12x100% = 100%
5	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Laproan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 Laporan	1.299.466.450	1.196.202.019	Dari target 12 Laporan telah terealisasi 12 Laporan dengan capaian kinerja = Realisasi/targetx100% = 12/12x100% = 100%
	Pengadaan Kendaraan Dinas Oprasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	6 Unit	649.490.360	609.442.699	Dari target 2 unit telah terealisasi 6 unit dengan capaian kinerja = Realisasi/targetx100% = 2/6x100% = 300%
	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Paket	649.976.090	586.759.320	Dari target 3 paket telah terealisasi 3 paket dengan capaian kinerja = Realisasi/targetx100% = 3/3x100% = 100%
6	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Laporan	8.070.146.778	7.231.923.095	Dari target 12 Laporan telah terealisasi 12 Laporan dengan capaian kinerja = Realisasi/targetx100% = 12/12x100% = 100%
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	9.300.000	6.800.000	Dari target 12 laporan telah terealisasi 12 laporan dengan capaian kinerja = Realisasi/targetx100% = 12/12x100% = 100%
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	2.881.836.875	2.275.766.885	Dari target 12 laporan telah terealisasi 12 laporan dengan capaian kinerja = Realisasi/targetx100% = 12/12x100% = 100%
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	5.179.009.903	4.949.356.210	Dari target 12 laporan telah terealisasi 12 laporan dengan capaian kinerja = Realisasi/targetx100% = 12/12x100% = 100%
7	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Laporan	5.684.047.325	4.702.011.877	Dari target 12 Laporan telah terealisasi 12 Laporan dengan capaian kinerja = Realisasi/targetx100% = 12/12x100% = 100%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	151 Unit	3.949.132.674	3.468.229.930	Dari target 156 Unit telah terealisasi 151 unit dengan capaian kinerja = Realisasi/targetx100% = 151/156x100% = 97%
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang	2 Unit	1.212.710.660	788.847.660	Dari target 3 unit telah terealisasi 2 unit dengan capaian kinerja = Realisasi/targetx100% =



		Dipelihara/Direhabilitasi				$2/3 \times 100\% = 67\%$
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	258 Unit	522.203.991	444.934.287	Dari target 214 unit telah terealisasi 258 unit dengan capaian kinerja = $\text{Realisasi/target} \times 100\% = 258/214 \times 100\% = 121\%$
8	Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD	Indeks Kepuasan Masyarakat lingkup BLUD Angkutan	85.86 Indeks	34.965.595.123	15.718.828.276	Dari target 85.73 indeks telah terealisasi 85.86 indeks dengan capaian kinerja = $\text{Realisasi/target} \times 100\% = 85.86/85.73 \times 100\% = 100.15\%$
		Indeks Kepuasan Masyarakat lingkup BLUD Parkir	77.15 Indeks			Dari target 85.73 indeks telah terealisasi 77.15 indeks dengan capaian kinerja = $\text{Realisasi/target} \times 100\% = 77.15/85.73 \times 100\% = 89.99\%$
	Pelayanan dan Penunjang pelayanan BLUD	Jumlah pengguna layanan BLUD Angkutan UPT Angkutan	653.563 orang	27.644.632.084	10.216.014.843	Dari target 839144 orang telah terealisasi 653563 orang dengan capaian kinerja = $\text{Realisasi/target} \times 100\% = 653563/839144 \times 100\% = 78\%$
		Jumlah pengguna layanan BLUD Parkir UPT Parkir	1.493.267 unit	7.320.963.039	5.502.813.433	Dari target 1423100 orang telah terealisasi 1493267 orang dengan capaian kinerja = $\text{Realisasi/target} \times 100\% = 1493267/1423100 \times 100\% = 105\%$

Dokumentasi Sasaran 2

Meningkatnya kinerja serta kualitas sumber daya manusia dan layanan administrasi perkantoran perangkat daerah





SASARAN RPD : Meningkatnya Kualitas Infrastruktur, Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana

INDIKATOR : Indeks Kelayakhunian Kota Aspek Tata Ruang, Lingkungan Hidup, Infrastruktur

TARGET : 7,95%

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Tahun 2024		%	Tahun 2025		%	Tahun 2026		%	Tahun 2029 Target Akhir RPJMD
				Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target
1	Meningkatnya Kelayakhunian Kota Aspek Tata Ruang, Lingkungan Hidup, dan Infrastruktur	Indeks Liveable City Aspek Tata Ruang, Lingkungan Hidup, dan Infrastruktur	%	7.66	7.78	101.57	7.95	-		8	-		8.15

Dalam perhitungan indeks livable city Kota Bandung tahun 2025, terdapat indikator dalam perhitungan. Indikator tersebut terbagi menjadi 2 (dua), yaitu indikator objektif dan subjektif. Indikator tersebut berdasarkan kepada 9 aspek yang digunakan dalam RPJMD Kota Bandung tahun 2025-2029 antara lain Aspek Pendidikan, Aspek Kesehatan, Aspek Ketenteraman, Aspek Sosial, Aspek Tata Ruang, Aspek Lingkungan, Aspek Transportasi, Aspek Infrastruktur dan Utilitas, dan Aspek Ekonomi. Terdapat total 329 indikator dalam penyusunan nilai livable city Kota Bandung tahun 2024. Indikator tersebut terdiri dari 64 indikator subjektif dan 265 indikator objektif yang disusun berdasarkan cascading RPD Kota Bandung tahun 2024-2026. Indikator tersebut juga menjadi data yang digunakan dalam analisis perhitungan indeks livable city.



Berdasarkan hasil perhitungan yang telah dilakukan terhadap 30 kecamatan yang ada di Kota Bandung, didapatkan perhitungan akhir skor LCI sebagai berikut :

Tabel 5. 10 Hasil Perhitungan Akhir Skor LCI Kota Bandung 2024

No	Kecamatan	Pendidikan	Kesehatan	Ketenteraman	Sosial	Tata Ruang	Lingkungan	Transportasi	Infrastruktur dan Utilitas	Ekonomi	LCI
1	Andir	9.34	9.17	8.35	8.82	7.75	8.74	8.78	8.09	7.19	8.47
2	Antapani	8.94	8.71	8.26	8.51	7.82	8.45	7.95	7.78	6.63	8.12
3	Arcamanik	8.59	8.49	8.03	8.37	7.61	8.23	7.97	7.53	6.72	7.95
4	Astanaanyar	8.79	8.70	8.04	8.00	7.64	8.32	8.38	7.71	6.72	8.03
5	Babakan Ciparay	8.44	8.43	7.84	8.21	7.13	8.12	8.02	7.39	6.47	7.78
6	Bandung Kidul	8.50	8.37	7.84	8.23	7.59	7.71	7.58	7.35	6.81	7.78
7	Bandung Kulon	8.41	8.44	7.80	8.32	7.09	8.26	7.91	7.46	6.36	7.78
8	Bandung Wetan	8.27	8.18	7.59	7.67	6.82	7.70	7.72	6.93	6.42	7.48
9	Batununggal	8.58	8.62	7.97	8.47	7.04	8.43	8.06	7.66	6.88	7.97
10	Bojongloa Kaler	8.33	8.24	7.64	8.39	7.13	7.52	7.94	7.14	6.60	7.66
11	Bojongloa Kidul	8.52	8.73	8.06	8.16	7.39	8.30	8.14	7.56	6.59	7.94
12	Buahbatu	8.45	8.35	7.70	8.17	7.42	8.18	8.03	7.50	6.80	7.84
13	Cibeunying Kaler	8.73	8.61	7.93	8.21	7.67	8.54	8.27	7.64	7.13	8.08
14	Cibeunying Kidul	8.59	8.70	8.05	8.31	7.60	8.25	8.07	7.47	6.83	7.99
15	Cibiru	8.87	8.63	7.97	8.85	7.46	8.43	7.97	7.67	6.74	8.06
16	Cicendo	8.89	8.72	7.99	8.48	7.05	8.11	8.09	7.35	6.63	7.92
17	Cidadap	8.37	8.68	7.94	8.32	7.36	8.55	8.38	7.70	6.75	8.01
18	Cinambo	8.81	8.77	8.01	8.47	7.26	8.53	8.18	7.76	7.28	8.12
19	Coblong	8.19	8.36	7.80	7.99	7.26	8.19	8.18	7.40	6.49	7.76
20	Gedebage	9.03	8.83	7.94	9.04	7.64	8.43	8.06	7.76	7.18	8.21
21	Kiaracondong	8.59	8.73	7.83	8.44	7.21	8.39	7.91	7.60	6.56	7.92
22	Lengkong	8.35	8.15	7.64	7.94	7.38	7.93	7.68	7.26	6.65	7.67
23	Mandalajati	8.33	8.55	8.16	8.41	7.60	8.12	7.80	7.31	6.34	7.84
24	Panyileukan	8.75	8.74	8.03	8.48	7.98	8.43	8.16	7.83	7.24	8.18
25	Rancasari	8.50	8.35	7.63	8.33	7.40	8.08	7.75	7.32	6.68	7.78
26	Regot	7.88	7.42	7.10	8.27	6.39	7.42	7.25	6.77	6.47	7.22
27	Sukajadi	8.92	8.81	8.22	8.56	7.17	8.27	8.34	7.58	6.71	8.06
28	Sukasari	8.45	8.59	8.02	8.11	7.53	8.55	8.53	7.85	7.14	8.09
29	Sumur Bandung	8.06	7.97	7.48	7.67	6.70	7.53	7.58	6.94	6.17	7.34
30	Ujung Berung	8.87	8.67	7.54	8.27	7.91	8.42	8.21	7.61	6.83	8.04
	Rerata	8.58	8.52	7.88	8.32	7.37	8.20	8.03	7.50	6.73	7.90

Sumber: Hasil Analisis, 2024

Berdasarkan pengelompokan aspek, didapatkan nilai dari livable city Kota Bandung sebagai berikut :

Tabel 5. 11 Hasil Perhitungan Nilai LCI Berdasarkan Sasaran RPD Tahun 2024-2026

Kelayakhunian Kota Aspek Sosial Budaya			
Aspek	Skor	Skor Kelayakhunian Kota Aspek Sosial Budaya	Target 2024
Aspek Kesehatan	8.52	8.33	7.81
Aspek Pendidikan	8.58		
Aspek Ketenteraman	7.88		
Aspek Sosial	8.32		
Kelayakhunian Kota Aspek Tata Ruang, Lingkungan Hidup, Infrastruktur			
Aspek	Skor	Skor Kelayakhunian Kota Aspek Tata Ruang, Lingkungan Hidup, Infrastruktur	Target 2024
Aspek Tata Ruang	7.37	7.78	7.66
Aspek Lingkungan	8.2		
Aspek Transportasi	8.03		
Aspek Infrastruktur-Utilitas	7.5		
Kelayakhunian Kota Aspek Ekonomi			
Aspek	Skor	Skor Kelayakhunian Kota Aspek Ekonomi	Target 2024
Aspek Ekonomi	6.73	6.73	7.15

Sumber: Hasil Analisis, 2024



Adapun ruas jalan yang diatasi pada tahun 2025 yaitu, berdasarkan hasil identifikasi di lapangan, berada di Jalan Tamblong, Jalan Pajajaran, Jalan Sulanjana, dan Jalan Prof. Dr. Ir. Sutami. Dari hasil survey di lapangan didapat data-data sebagai berikut :

NO	RUAS JALAN	RENCANA AKSI PENAGGULANGAN KEMACETAN
Ruas Jalan yang di Atasi Tahun 2025		
Jalan Tamblong		
Aspek penyebab kemacetan : Urusan Perhubungan		
1	Pengaturan waktu siklus traffic light/lampu lalu lintas JI Tamblong	Menempatkan Anggota PPL di sekitar lokasi untuk melakukan penghimbauan dan penertiban
Aspek penyebab kemacetan : Urusan Non Perhubungan		
1	Aksesibilitas keluar masuk area pertokoan / pendidikan JI. Tamblong	Menempatkan Anggota PPL di sekitar lokasi untuk melakukan penghimbauan dan penertiban serta berkoordinasi dengan Disperindag
JL. Pajajaran		
Aspek penyebab kemacetan : Urusan Perhubungan		
1	Parkir Liar On street JL. Pajajaran	Menempatkan Anggota PPL di sekitar lokasi untuk melakukan penghimbauan dan penertiban
Aspek penyebab kemacetan : Urusan Non Perhubungan		
1	Aksesibilitas keluar masuk area pertokoan / pendidikan JL. Pajajaran	Menempatkan Anggota PPL di sekitar lokasi untuk melakukan penghimbauan dan penertiban serta berkoordinasi dengan Disdik/Disperindag
JL. Sulanjana		
Aspek penyebab kemacetan : Urusan Perhubungan		
1	Parkir Liar On street JL. Sulanjana	Menempatkan Anggota PPL di sekitar lokasi untuk melakukan penghimbauan dan penertiban
Jalan Prof. Dr. Ir. Sutami		
Aspek penyebab kemacetan : Urusan Perhubungan		
1	Parkir Liar On street Jalan Prof. Dr. Ir. Sutami	Menempatkan Anggota PPL di sekitar lokasi untuk melakukan penghimbauan dan penertiban



Aspek penyebab kemacetan : URUSAN PERHUBUNGAN

Sementara untuk capaian kinerja program, sisa aspek penyebab kemacetan urusan perhubungan sampai dengan TW 4 2024 sebanyak 135 aspek, dengan persentase 16.77%, target di TW 4 2024 sebesar 16.77%, dan capaian kinerja TW 4 2024 untuk aspek penyebab kemacetan urusan perhubungan sebesar 100%.

Pada Triwulan 1 2025 berhasil menyelesaikan 1 aspek penyebab kemacetan urusan perhubungan, sehingga sampai dengan TW 1 2025 sisa aspek penyebab kemacetan sebanyak 134 aspek dengan persentase 16.65%, target di TW 1 2025 sebesar 16.65%, dan capaian kinerja TW 1 2025 untuk aspek penyebab kemacetan urusan perhubungan sebesar 100%.

Kemudian Triwulan 2 2025 berhasil menyelesaikan 1 aspek penyebab kemacetan urusan perhubungan, sehingga sampai dengan TW 2 2025 sisa aspek penyebab kemacetan sebanyak 133 aspek dengan persentase 16.52%, target di TW 2 2025 sebesar 16,52%, dan capaian kinerja TW 2 2025 untuk aspek penyebab kemacetan urusan perhubungan sebesar 100%.

Dan pada Triwulan 3 2025 berhasil menyelesaikan 1 aspek penyebab kemacetan urusan perhubungan, sehingga sampai dengan TW 3 2025 sisa aspek penyebab kemacetan sebanyak 132 aspek dengan persentase 16.40%, target di TW 3 2025 sebesar 16.40%, dan capaian kinerja TW 3 2025 untuk aspek penyebab kemacetan urusan perhubungan sebesar 100%.

Pada Triwulan 4 2025 tidak berhasil menyelesaikan 1 aspek penyebab kemacetan urusan perhubungan, sehingga sampai dengan TW 4 2025 sisa aspek penyebab kemacetan masih sebanyak 132 aspek dengan persentase 16.40%, target di TW 4 2025 sebesar 16.27%, dan capaian kinerja TW 4 2025 untuk aspek penyebab kemacetan urusan perhubungan sebesar 99.20%.



BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Perhubungan Kota Bandung Tahun 2025 ini merupakan pertanggungjawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*) Dinas Perhubungan Kota Bandung Tahun 2025. Pembuatan LKIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKIP Dinas Perhubungan Kota Bandung Tahun 2025 ini dapat menggambarkan kinerja Dinas Perhubungan Kota Bandung dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Dalam tahun 2025 Dinas Perhubungan Kota Bandung menetapkan sebanyak 2 (dua) sasaran dengan 3 (tiga) indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang ingin dicapai. Secara rinci pencapaian sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Sasaran 1 terdiri dari 2 indikator dengan nilai 97.36 %
- Sasaran 2 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 102.45 %



Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 2 sasaran tersebut, secara umum telah melebihi target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Dalam Tahun Anggaran 2025 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Perhubungan Kota Bandung dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp.269.455.857.116,91,- sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp.229.318.660.135,00,-, dengan demikian dapat dikatakan tahun 2025 Dinas Perhubungan Kota Bandung kondisi anggaran adalah Silpa Rp.40.137.196.981,91,-

Renstra Dinas Perhubungan Kota Bandung 2025-2029 menetapkan sebanyak 2 (dua) sasaran dengan 3 (tiga) indikator kinerja tersebut telah dilaksanakan melalui Rencana Kinerja Tahunan tahun ke 1 dari lima tahun yang direncanakan yaitu pada tahun 2025, dengan rincian pencapaian sasaran sebagai berikut :

- Sasaran 1 terdiri dari 2 indikator dengan nilai 97.36 %
- Sasaran 2 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 102.45 %



Dalam kurun waktu 1 (satu) tahun tersebut telah menggunakan anggaran sebesar Rp.229.318.660.135,00,- telah mewujudkan capaian kinerja untuk menunjang pencapaian Misi dan Visi Dinas Perhubungan Kota Bandung. Berdasarkan pagu anggaran tersebut maka realisasi anggaran yang telah digunakan oleh Dinas Perhubungan Kota Bandung adalah 85,10 % dari anggaran yang direncanakan, hal tersebut menunjukkan bahwa perencanaan Dinas Perhubungan Kota Bandung perlu dioptimalkan kembali agar lebih efektif dan efisien dalam meningkatkan kinerja yang mendukung pencapaian Visi dan Misi Kota Bandung.

B. Rekomendasi

1. Penguatan sistem angkutan massal dengan mempercepat pengembangan dan perluasan sistem angkutan massal yang terintegrasi, termasuk Bus Rapid Transit (BRT) dan moda transportasi massal lainnya yang sesuai dengan kondisi geografis Bandung.
2. Memastikan armada angkutan umum yang aman, nyaman, bersih, dan tepat waktu, dengan meningkatkan kualitas pelayanan pengemudi dan petugas.
3. Tingkatkan penerapan sistem transportasi cerdas Intelligent Transport System (ITS) yang mencakup Area Traffic Control System (ATCS) yang lebih canggih, sistem informasi lalu lintas real-time, dan manajemen parkir elektronik seperti pemanfaatan hand held.
4. Tingkatkan penegakan hukum terhadap pelanggar aturan lalu lintas, termasuk parkir liar, melawan arus, dan pelanggaran rambu lainnya, manfaatkan teknologi CCTV untuk bukti penindakan.
5. Menjalin dan meningkatkan kemitraan dengan Pemerintah Provinsi dan Pusat, dalam perencanaan dan pengembangan proyek transportasi yang lebih besar, salah satunya dengan menggandeng sektor swasta untuk investasi.

C. Tindak Lanjut LKPJ

1. Dalam hal penguatan sistem transportasi umum massal dan feeder telah dan masih dilaksanakan kajian sistem feeder dan rerouting angkutan umum di Kota Bandung baik yg telah dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kota Bandung atau sedang dilaksanakan oleh Tim PMC Bandung Raya, setelah semua kajian selesai perlu disepakati bersama melalui PKS atau Perjanjian Kerjasama antar Pemerintah Daerah untuk mendukung pemberian PSO tidak hanya untuk BRT melainkan juga sistem feedernya (sudah termasuk cashless payment dan gaji untuk supir atau pengemudi).



2. Melakukan pemeliharaan baik berkala atau pemeliharaan berat pada Bus Trans Metro Bandung dan Bus Sekolah untuk meningkatkan kualitas pelayanan baik dalam segi operasional.
3. Melakukan pemeliharaan Area Traffic Control System dan akan dilakukan kajian terkait perencanaan transportasi cerdas dengan melibatkan konsultan.
4. Melakukan penertiban parkir liar terhadap pengguna jalan oleh petugas Derek, Petugas Pengatur Lalu Lintas dan berkolaborasi dengan jajaran kepolisian dan TNI ke lokasi lokasi sesuai aduan masyarakat dan lokasi yang telah di tentukan, serta menambah waktu dan lokasi penertiban.
5. Peningkatan kemitraan antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota di Bandung Raya telah terjalin melalui penandatanganan Nota Kesepakatan Bersama untuk Rencana Pembangunan dan Pengembangan BRT di Bandung Raya, hal ini masih akan terus berlangsung sampai dengan Desember Tahun 2027, dan ditindak lanjuti melalui pembangunan prasarana jalan untuk menunjang pengembangan BRT.

D. Saran

Dalam mencapai sasaran strategis terdapat beberapa hambatan ataupun kendala. Beberapa permasalahan yang dihadapi Dinas Perhubungan Kota Bandung dalam pemenuhan target kinerja tahun 2025 antara lain sebagai berikut :

1. Keterbatasan kewenangan urusan perhubungan terhadap beberapa faktor penyebab kemacetan; koordinasi lintas perangkat daerah belum optimal; keterbatasan sumber daya dan anggaran; munculnya titik kemacetan baru.
2. Minat masyarakat beralih ke angkutan umum masih rendah; tingginya preferensi penggunaan kendaraan pribadi; pertumbuhan kendaraan pribadi lebih cepat dibanding peningkatan pengguna angkutan umum; kualitas dan integrasi layanan angkutan umum masih perlu ditingkatkan.
3. Tidak tercapainya target pendapatan BLUD Angkutan maupun BLUD Parkir yang dipengaruhi oleh beberapa hal antara lain intervensi pihak ketiga dan kebijakan pemerintah tertentu yang berdampak pada penurunan pendapatan.

Dengan beberapa permasalahan diatas, terdapat beberapa Solusi yang bisa dilakukan, antara lain:



1. Penguatan koordinasi lintas perangkat daerah, prioritas penanganan sesuai kewenangan, serta pemetaan dan pemutakhiran data titik kemacetan secara berkala.
2. Peningkatan kualitas dan integrasi layanan angkutan umum serta sosialisasi dan sinergi kebijakan untuk mendorong peralihan moda transportasi.
3. Melakukan pemeliharaan armada angkutan umum secara berkala serta menentukan jalur alternatif agar operasional angkutan umum tetap berjalan, serta menyelenggarakan pelatihan sumber daya manusia guna meningkatkan profesionalisme dan kinerja pengelolaan parkir.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perhubungan Kota Bandung ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Dinas Perhubungan Kota Bandung kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kota Bandung.

Kota Bandung, Januari 2026

Kepala Dinas Perhubungan
Kota Bandung



RASDIAN SETIADI, S.IP., MM.
NIP. 196909202014101001